

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arinanto, Satya, 2018, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta.
- Asplund, Knut D. dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Baderin, Mashood A., 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Bahar, Saafroedin dkk., 1992, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Keemrdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei – 19 Agustus 1945*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Barak, Aharon, 2012, *Proportionality Constitutional Rights and their Limitations*, Cambridge University Press, New York.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Buergetal, Thomas, 1995, *International Human Rights in a Nutshell*, West Publishing Co, USA.
- Davidson, Scott, 1994, *Hak Asasi Manusia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda, 2012, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Garner, Bryan A., 2009, *Black's Law Dictionary*, West Publishing CO., Texas.
- Hadjon, Philipus M. dkk., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bhina Ilmu, Surabaya.

- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia)*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hart, H.L.A., 2010, *The Concept of Law*, yang diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konspe Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Humah, Darsis, 2007, *Cita-cita Negara Hukum di Indonesia Studi Tentang Pembuatan Tambahan Penjelasan UUD 1945 dan Piagam HAM oleh MPRS pada Masa Transisi*, Yogyakarta, Surya Sarana Grafika.
- Iskandar, Pranoto, 2012, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur.
- Ismail, Faisal, 1999, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta Faisal Ismail, 1999, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Jayawickrama, Nihal, 2002, *The Judicial Application of Human Rights Law National, Regional And International Jurisprudence*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Komnas HAM, 2009, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Komnas HAM, Jakarta.
- Kurnia, Titon Slamet, 2015, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008*, Mandar Maju, Bandung.
- Lubis, Todung Mulya, 1994, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahfud, Moh. MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marbun, S.F., 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Maria, Sumarjono S.W, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Masruhan, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dkk., 2009, *Hak Asasi Manusa – Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam perspektif Hukum & Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

- Nasution, Bahder Johan, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung
Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Nowak, Manfred, 2003, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden.
- Prins, W.F., 1950, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Walters Groningen, Jakarta.
- R. Abdussalam, 2003, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, PTIK, Jakarta Selatan.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Riyadi, Eko, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok.
- Rover, C. de, 2000, *To Serve & To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Safa'at, Muchammad Ali, 2017, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Saleh, Hasanuddin M., 1996, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM Studi tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, Genta Publishing, Bantul.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Soemantri, Sri, 1979, *Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Spelt, N.M. dan J.B.J.M.ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Sugono, Dendy dkk., 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Suwignyo, Agus, 2019, *Post-Truth dan (Anti) Pluralisme*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Winayanti, Nia Kania, 2011, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)*, Pustaka Yustisa, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Universal Declaration of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Prinsip Siracusa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966.

Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Noor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD NRI 1945.

Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3298).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430)

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 239 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6139)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 239 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6084)

Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 149 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1916).

Keputusan Presiden Nomor 200 dan 201 Tahun 1960.

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1963.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT.

C. Karya Ilmiah, Jurnal, dan Surat Kabar

Aleinikoff, Thomas Alexander, "Constitutional Law in The Age of Balancing", The Yale Law Journal, Vol. 96, No. 5, April 1987.

Barnett, Randy E., "Are Enumerated Constitutional Rights The Only Rights We Have? The Case of Associational Freedom", Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol. 10, 1987.

Bisariyadi, "Penerapan Uji Proporsionalitas Dalam Kasus Pembubaran Partai : Sebuah Perbandingan", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No.1 Januari-Maret 2018.

Eliya, Moshe Cohen- and Iddo Porat, "American Balancing And German Proportionality: The Historical Origins", International Journal Of Constitutional Law, Volume 8, Issue 2, 1 April 2010.

Koji, Teraya, "Emerging Hierarchy in International Human Rights and Beyond : From The Perspective of Non Derogable Rights", Jurnal European Journal of International Law (EJIL) Volume 12 No 5.

Kurnia, Titon Slamet, "Konsep Negara Berbasis Hak sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang", Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012.

Mahdi, Imam, "Pembubaran Ormas 'Radikal' Dalam Prespektif Perundang-Undangan (Kajian Khusus Perppu No 2 Tahun 2017)", Jurnal Nuansa, Vol X, No . 2, Desember 2017.

McGoldrick, Dominic, "The interface between public emergency powers and international law", International Journal of Constitutional Law, Volume 2, Nomor 2, April 2004.

Nalle, Victor Imanuel W., "Asas *Contrarius Actus* pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia", Padjadjaran Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017.

Nasution, Aulia Rosa, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi", Jurnal MERCATORIA, Vol. 11 No. 1 Juni 2018.

- Neumayer, Eric, "Do governments mean business when they derogate? Human rights violations during notified states of emergency" Jurnal The Review of International Organizations, Volume 8 No 1, Maret 2013, Springer, <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11558-012-9144-y>, diakses pada tanggal 14 Juli 2018, hlm. 1-31.
- Nugroho, Eryanto, "Kerangka Hukum Untuk Kegiatan Sosial di Indonesia", Jurnal Jentera, Edisi 16, 2007.
- Pratiwi, Sapti Eka, "Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin", Jurnal Avatara, Vol. 4, No. 3, Oktober 2016.
- Purnamasari, Galuh Candra, "Problematisasi Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia", Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017.
- Rona, Gabor & Lauren Aarons, "*State Responsibility to Respect, Protect and Fulfill Human Rights Obligations in Cyberspace*", Journal Of National Security Law & Policy, Vol. 8, Tahun 2016.
- Siaran Pers Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Oktober 2017 dengan judul Sidang PERPPU Ormas, MK dengar Keterangan Ahli Pemohon.
- Sweet, Alec Stone dan Jud Mathews, "Proportionality Balancing and Global Constitutionalism", Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 47., 2008.
- Tyagita, Andanti, "Prinsip Kebebasan Berserikat dalam Serikat Buruh sebagai Upaya Perlindungan dan Penegakan Hak Normatif Pekerja", Jurnal Yuridika, Vol. 26, No. 1, Januari-April 2011.
- Winata, Muhammad Reza, "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 4, Desember 2018.

D. Internet

- Hendra Friana, "Yusril: Asas Contrario Actus di Perppu Ormas Tak Demokratis". <https://tirto.id/yusril-asas-contrario-actus-diperppu-ormas-tak-demokratis-csAH> diakses pada tanggal 8 Juli 2018.
- Risalah Sidang Perkara Nomor 94/PUU-XV/2017, Jakarta, 21 Januari 2018 yang diakses dari www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 10 Juli 2018.
- Romli Atmasasmita, "Perppu Ormas". <https://nasional.sindonews.com/read/1250793/18/perppu-ormas-1508723767> diakses pada tanggal 11 Juli 2018.
- Sabrina Asril, "Ini Poin Kontroversi UU Ormas". <https://nasional.kompas.com/read/2013/06/25/0621437/Ini.Poin.Kontroversi.RUU.Ormas> diakses pada tanggal 18 Juli 2018.

Fabian Januarius Kuwado, “Wiranto Ungkap Kekurangan UU Ormas yang Jadi Urgensi Terbitnya Perppu”
<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/11561161/wiranto.ungkap.kekurangan.uu.ormas.yang.jadi.urgensi.terbitnya.perppu> diakses pada tanggal 21 Juli 2018

Bonaventure Rutinwa, “Freedom of Association And Assembly Unions, NGOs and Political Freedom in Sub-Saharan Africa.”
<https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/sub-saharan-africa-freedom-of-association-and-assembly.pdf> diakses pada tanggal 31 Juli 2018.

Maruarar Siahaan, “Hak Konstitusional Dalam UUD 1945”,
lama.elsam.or.id/downloads/1322798965_HAK_KONSTITUSIONAL_DALAM_UUD_1945, diakses 14 September 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/18444851/hti.kami.tidak.pernah.diberi.surat.peringatan.oleh.pemerintah> diakses pada tanggal 20 September 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170510120700-12-213745/pemerintah-klaim-sudah-beri-surat-peringatan-untuk-hti> diakses pada tanggal 20 September 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intoleransi> diakses pada tanggal 20 September 2019.